

**POTRET KELUARGA KORBAN KONFLIK DAN  
PEMBERDAYAAN SOSIAL DI KECAMATAN  
PANGA KABUPATEN ACEH JAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**PUTRIANA  
NIM. 150305062**

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi: Sosiologi Agama**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

**DARUSSALAM-BANDA ACEH**

**2020 M / 1441 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Putriana  
NIM : 150305062  
Jenjang : Srata Satu (S1)  
Program Studi : Studi Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 15 Januari 2020

yang menyatakan,



**NIM.150305062**

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

## LEMBARAN PENGESAHAN

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

Sebagai salah satu beban studi  
untuk memperoleh gelar sarjana (S1)  
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Studi Sosiologi Agama

Diajukan Oleh:

**PUTRIANA**  
NIM. 150305062

Mahasiswa/i Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi: Sosiologi Agama

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Arfiansyah, S.Fil.,MA  
**NIP.198104222006041004**

Pembimbing II



Fatimahsyam,SE,MSi  
**NIDN.0113127201**

## SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban  
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan  
Filsafat  
**Prodi Sosiologi Agama**

Pada Hari/Tanggal: Senin, 27 Januari 2020M

2 Jumadil Akhir 1441H  
di Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah

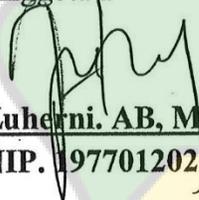
Ketua

  
Artiansyah, S.Fil, MA  
NIP. 198104222006041004

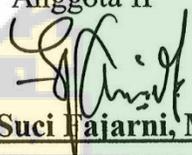
Sekretaris

  
Fatimahsyah, SE, M.Si  
NEDN. 0113127201

Anggota I

  
Zuherni. AB, M.Ag  
NIP. 197701202008012006

Anggota II

  
Suci Fajarni, M.A  
NIP. 1991033020180120

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat  
Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Drs. Fuadi, M. Hum  
NIP. 196502041995031002

## ABSTRAK

Nama/ NIM : PUTRIANA/ 150305062

Judul Skripsi : Potret Keluarga Korban Konflik Dan  
Pemberdayaan Sosial di Kecamatan Panga  
Kabupaten Aceh Jaya

Halaman : 59

Prodi : Sosiologi Agama

Pembimbing I : Arfiansyah, S.Fil.,MA

Pembimbing II : Fatimahsyam, SE, M.Si

Aceh provinsi di Indonesia yang salah satunya mengalami konflik adalah konflik antara pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka(GAM) pada tahun 1976-2005. Kecamatan Panga merupakan salah satu kecamatan yang mengalami konflik tersebut. Pada masa terjadinya kasus ini berbagai bentuk kekerasan terjadi, seperti pembakaran rumah-rumah penduduk, penangkapan, penahanan dan pembunuhan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana potret keluarga korban konflik, program-program pemberdayaan pemerintah dan dampak pemberdayaan di Kecamatan Panga. Dalam penelitian ini peneliti mengambil teori pemberdayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat korban konflik mengalami berbagai kekerasan pada masa terjadinya konflik seperti pembakaran rumah, penyiksaan, dan pembunuhan tetapi pasca konflik pemerintah membuat beberapa program bagi keluarga korban konflik, seperti program UEP( Usaha Ekonomi Produktif), program mendirikan rumah yang dibakar pada masa konflik yaitu palawija, kelontong, peralatan kue dan mesin jahit. Dengan adanya pemberdayaan dari pemerintah masyarakat hidup lebih tenang, nyaman dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kata Kunci : Pemberdayaan Korban Konflik

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Wasyukurillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Potret Keluarga Korban Konflik dan Pemberdayaan Sosial di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya”**. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga para sahabat serta pengikutnya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga sudah sepatutnya pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengatakan terima kasih sebesar-besarnya terutama kedua pembimbing yaitu:

Bapak Arfiansyah, S.Fil.,MA selaku pembimbing I yang telah membimbing dan memberi pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan Ibu Fatimahsyam, SE, M.Si selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing serta memberikan pengarahan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dan juga kepada Pemerintah Aceh jaya yang telah membantu memberikan data.

Teristimewa kepada kedua orang tua peneliti Almarhum Mahmud R dan Halimah yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan dalam pengorbanannya baik dari segi moral, materi kepada penulis, sehingga penulis dapat berhasil dalam menyelesaikan pendidikan Strata SI serta dalam menyesuaikan skripsi ini. Untuk adik yang selalu menyemangati Agus Gunawan, Andi Gunawan Syahril Ramadhan, Nenek, Makning dan semua keluarga peneliti. Terimakasih kepada Boy Hakki yang telah menemani peneliti selama penelitian ini berlangsung.

juga kepada Rizki Desti Mancura yang telah menyemangati peneliti selama ini, kepada sahabat peneliti terkhusus (Annisa Nivia Putri, Irma, Intan, Eja, Maisarah, Zara, Ratna,Inda, dan Nyak Nur) yang selalu memberi semangat dan motivasi dan yang selalu mendengar keluh kesah selama peneliti menyelesaikan skripsi. Dan terimakasih juga yang sebanyak-banyaknya kepada bunda Yuni dan Rahma teman sseperjuangan yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Mudah-mudahan atas partisipasi dan motivasi yang sudah diberikan sehingga menjadi amal kebaikan dan mendapat pahala yang setimpal di sisi Allah SWT. Penulis menyadari akan terbatasnya pengetahuan yang penulis miliki dan penulis mengupayakan tulisan ini sesempurna mungkin, namun penulis masih mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Demi kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang dengan harapan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah mengabulkan dan memberi kemudahan pada kita semua. Amin.

Banda Aceh, 28 Desember 2019

Penulis,

PUTRIANA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Masalah .....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Kajian Pustaka .....	9
B. Landasan Teori .....	13
C. Definisi Operasional.....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	19
B. Lokasi Penelitian .....	19
C. Informan Penelitian .....	20
D. Teknik Pengumpulan Data .....	20
E. Sumber Data .....	23
F. Teknik Analisis Data .....	24
G. Sistematika Penulisan.....	26

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Wilayah Panga Kabupaten Aceh Jaya .....	28
a. Kondisi Wilayah .....	28
b. Kondisi Ekonomi Masyarakat .....	28
c. Visi dan Misi Kecamatan Panga.....	29
B. Potret Keluarga Korban Konflik di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya .....	30
C. Program Pemberdayaan Pemerintah Bagi Keluarga Korban Konflik.....	32
a. Jenis-Jenis Program Pemberdayaan Pemerintah.....	32
b. Mekanisme Penyaluran Bantuan .....	37
c. Respon Penerima Dan Yang Tidak Menerima a. Bantuan .....	41
D. Dampak Pemberdayaan Pemerintah Terhadap Keluarga Korban Pasca Konflik.....	44
b. Dampak Ekonomi .....	45
c. Dampak Sosial .....	47
d. Dampak Politik .....	49

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran .....	52

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>55</b>
-------------------------------	-----------

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.....	55
Lampiran 2: Surat Keterangan Pengantar Penelitian .....	56
Lampiran 3: Foto-foto Kegiatan.....	57



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu provinsi yang mengalami konflik, konflik di Aceh salah satunya adalah konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah pada tahun 1976- 2005. Peristiwa kali ini merupakan tragedi paling banyak menelan korban seiringnya waktu, jumlah korban semakin mencapai seluruhnya 35.000 jiwa. Kejadian ini terjadi pada saat ditetapkannya sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Kemudian berubah menjadi Daerah Darurat Militer. Konflik antara GAM dengan pemerintah menjadi ajang kekerasan terhadap masyarakat Aceh. Konflik yang terjadi telah melahirkan kemarahan dan kebencian dalam masyarakat Aceh.<sup>1</sup>

Gerakan Aceh merdeka dideklarasikan pada 4 desember 1976 yang dipimpin oleh Hasan Tiro melalui GAM merupakan gerakan pembebasan yang ingin membebaskan rakyat Aceh dari belenggu ketidakadilan pemerintah Indonesia. Pada tahun 1977 perlawanan GAM semakin agresif, diantara terbunuhnya dua orang asing yang berasal dari Amerika. setelah pembunuhan itu pemerintah menempatkan pasukan di Aceh. Aparat keamanan semakin meningkatkan perang psikologis untuk melawan GAM dan pemimpin-pemimpinnya ditengah masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Al-Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*, Banda Aceh: Madani Press, 1999. Hal 3

<sup>2</sup> Nasruddin Syamsuddin, *Integrasi Politik di Indonesia*, Jakarta: Gramedia. Hal 77

Ironisnya tak hanya ditunjukkan kepada toko-toko GAM tetapi juga kepada rakyat biasa mereka disiksa secara biadab oleh aparat keamanan, tujuannya agar rakyat tidak mendukung GAM begitu juga disaat mencari orang-orang GAM yang bersembunyi aparat tak segan melakukan penyiksaan terhadap rakyat biasa. Berbagai serangkaian penangkapan dilakukan, ribuan orang baik perempuan, anak-anak maupun orang tua disiksa.<sup>3</sup>

Pada saat tentara Indonesia melakukan pencarian kerumah-rumah yang diduga sebagai daerah basis GAM, tentara Indonesia melakukan kekerasan dan pelanggaran HAM seperti:

1. Melakukan pembakaan terhadap rumah-rumah warga
2. Melakukan penyiksaan terhadap warga
3. Melakukan penangkapan dan melakukan penyanderaan terhadap istri dan anak-anak GAM
4. Melakukan pembunuhan diluar proses hukum terhadap anggota GAM.<sup>4</sup>

Panga merupakan salah satu kecamatan yang mengalami konflik GAM. Data jumlah korban konflik di Aceh Jaya 898 orang, tapol 533 orang dan napol 298 orang total korban 1.729 orang. Khusus Kecamatan Panga jumlah korban konflik 99 orang, tapol 63 orang dan napol 36 orang jumlah total korban 198 orang.<sup>5</sup> Pada saat terjadinya konflik keluarganya yang sangat menderita khusus perempuan,

---

<sup>3</sup> Kontras, Aceh, *Damai Dengan Keadilan? Mengungkapkan Kekerasan Masa Lalu*, Jakarta: Kontras, 2006. Hal 18

<sup>4</sup> Kontras, Aceh, *Damai Dengan Keadilan? Mengungkapkan Kekerasan Masa Lalu*. Hal 21

<sup>5</sup> Wawancara dengan Hanafiah Pegawai BRA Pada Tanggal 20 Desember 2019

anak-anak dan juga anggota keluarga lainnya yang ikut tertindas dalam masa konflik tersebut.

Pada masa terjadinya kasus ini berbagai bentuk kekerasan terjadi, pembakaran rumah-rumah penduduk, penangkapan dan penahan sewenang-wenang termasuk dengan penyiksaan terhadap orang-orang yang dituduh anggota GAM maupun terhadap warga masyarakat lainnya yang dianggap sebagai bagian dari anggota keluarga atau mengetahui keberadaan GAM atau sekedar bertempat tinggal di wilayah yang dianggap lokasi persembunyian GAM. Sebagian diantara mereka dibunuh tanpa proses hukum dan dihilangkan tanpa kejelasan nasib dan keberadaannya.<sup>6</sup> Oleh karena itu, saya tertarik untuk melakukan penelitian ini di Kecamatan Panga yang banyak sekali dengan sejarah terdahulu seperti konflik antara GAM dengan TNI. Masyarakatnya masih dominan pemikiran terhadap persatuan tersebut.

Saat konflik kehidupan warga di Kecamatan Panga terusik, mereka terpaksa lari meninggalkan desa setempat, Kecamatan Panga yang diyakini saat itu dijadikan sebagai tempat persembunyian para GAM karena sebagian desa di Kecamatan Panga terdapat dipedalaman. Wilayah Kecamatan Panga mengalami kemiskinan, keterbelakangan pada masa tersebut tidak ada pemberdayaan dari pemerintah. Kecamatan ini adalah daerah pertanian tetapi pada masa konflik pertumbuhan ekonomi Panga mengalami kemunduran. Daerah ini dulunya terkesan angker karena dijaga dan dipantau oleh banyak aparat keamanan. Masyarakat tidak bebas melakukan aktivitas siang malam diliputi rasa takut, gerak gerik mereka dicurigai apalagi jika mereka beraktivitas dikebun dan di sawah. Bisa saja mereka

---

<sup>6</sup> Kontras, Aceh, *Damai Dengan Keadilan? Mengungkapkan Kekerasan Masa Lalu*. Hal 25

dituduh menyembunyikan senjata. Kecamatan Panga memang tergolong daerah paling mencekam, sebab daerah ini dikenal sebagai basis GAM. Masyarakat Panga tergolong sangat memperjuangkan keberadaan GAM.<sup>7</sup>

Pengaruh konflik GAM-RI ini terhadap kehidupan masyarakat Kecamatan Panga termasuk dalam bidang sosial yaitu terjadinya perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam satuan yang mempengaruhi system sosialnya, termasuk di dalam nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara masyarakat, serta kelompok-kelompok masyarakat. Dimana perubahan terjadi di Kecamatan Panga akibat konflik GAM-RI ini dapat merubah system sosial mereka.

Dimana perubahan tersebut adalah terjadinya perubahan sikap masyarakat Aceh serta runtuhnya nilai-nilai adat serta budaya di Aceh. Situasi konflik yang terus melanda tanah Aceh telah menyebabkan terjadinya proses kehancuran system adat secara perlahan-lahan, seperti hancurnya kelembagaan adat, hilangnya hak-hak adat dan pendangkalan pemahaman terhadap adat istiadat. Norma adat istiadat di Panga yang sudah mulai runtuh adalah system kenduri, prosesi pernikahan, lembaga adat yang sudah tidak digunakan kembali dan hilangnya system tolong menolong seperti adanya gotong royong.

Pada dasarnya nilai gotong royong yang awalnya sangat mengental dan mudah dilakukan juga sudah mulai menurun karena adanya konflik. Konflik di Aceh yang panjang pada saat itu, dengan tekanan dan ancaman yang beragam jelas bukan menjadi hal yang mudah untuk menegaknya bantuan kemanusiaan. Ada beberapa yang terlupakan dengan konflik ini yaitu peran aktivis perempuan

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Mawardi Camat Panga Pada 17 Maret 2020

merupakan salah satu kelompok aktivis yang bertahan untuk ini, atas semangat kemanusiaan dengan tujuan membantu baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.

Masyarakat Aceh juga banyak mengalami kesulitan karena banyak tindakan deskriminasi ditempat yang mereka tinggali. Hal ini akan menjadikan bagaimana kondisi masyarakat Panga dalam keadaan mental mereka karena hampir 30 tahun berkonflik dengan NKRI mereka banyak merasakan kesulitan-kesulitan dan kejadian yang sangat menyakitkan pada umunya. Karena pengalaman yang dirasakan masyarakat akan penerapan pemerintah di Aceh secara logis memang memberikan dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat akibatnya masyarakat menjadi truma dan kehilangan kebebasannya dan mulai kurang percaya terhadap sesama bahkan orang asing.

Dimasa konflik Aceh sangat memprihatinkan karena kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap daerah Aceh. Hal ini membuat kondisi ekonomi di Aceh semakin terpuruk karena masyarakat susah untuk berdagang karena kondisi Aceh tidak aman, dimasa konflik masyarakat tidak berani untuk membuka usaha karena pada masa itu masyarakat mendirikan usaha pasti tidak akan maju.

Terlepas dari itu perlu diketahui kondisi ekonomi semakin terpuruk ketika datang bencana yaitu gempa dan tsunami yang menghancurkan semua bangunan dan pada saat itu ekonomi di Aceh mati sama sekali tidak jalan karena kondisi Aceh saat itu sangat terpuruk, hal tersebut mengingat besarnya kerusakan dan kerugian yang disebabkan tsunami, ketika Aceh mengalami pertumbuhan

ekonomi yang sangat rendah alasan utamanya adalah setelah konflik dan setelah tsunami.<sup>8</sup>

Namun setelah sekian lama akhirnya konflik Aceh berakhir dengan diawali adanya bencana tsunami kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya yang mendapatkan dampak dari bencana tersebut. Setelah terjadinya konflik dan tsunami Aceh telah dihadapkan kepada kemiskinan yang tinggi sehingga perekonomian di Aceh sangat memburuk salah satunya yang terkena dampak tersebut adalah Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya. Konflik berkepanjangan antara GAM dengan pemerintah Indonesia membawa pengaruh yang sangat merugikan dalam aspek ekonomi dan harta benda korban.

Seiring berjalannya waktu pemerintah mulai memperhatikan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Panga dan pertumbuhan ekonomi mulai tumbuh kembali menunjukkan kondisi perekonomian yang cenderung stabil. Pertumbuhan ekonomi yang positif ini tidak lepas dari kerja keras pemerintah, masyarakat mulai bekerja seperti biasanya.

Namun setelah perdamaian konflik pada tahun 2005 banyak sekali program-program pemberdayaan atau program-program bantuan untuk keluarga korban konflik dengan menghabiskan dana yang begitu banyak. Banyak bantuan dari pemerintah yang telah dilakukan terutama dalam sektor ekonomi.<sup>9</sup> Kini setelah terjadinya konflik situasi keaman menjadi kondusif, aktivitas ekonomi

---

<sup>8</sup> Mahatir Muhammad, *Pembangunan di Aceh Pasca Tsunami dan Konflik GAM-Pemerintah Indonesia Dalam Aspek Ekonomi Politik*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019. Hal 6- 7

<sup>9</sup> Mahatir Muhammad, *Pembangunan di Aceh Pasca Tsunami dan Konflik GAM-Pemerintah Indonesia Dalam Aspek Ekonomi Politik.*, 2019. Hal 12

menggeliat tidak hanya di siang hari tetapi juga sampai larut malam. Kedai-kedai atau warung kopi kopi ada yang buka sampai 24 jam sehari. Jalan lintas Banda Aceh Melabohpun tidak pernah sepi dari aktivitas kendaraan selama 24 jam kondisi itu tentu saja berbeda saat Aceh didera konflik.

Sekarang masyarakat sudah berdamai dengan masa lalu tidak ada lagi bunyi tembakan antara GAM dan aparat Indonesia. Di masa konflik kehidupan politik dan ekonomi, dan sosial sangat buruk. Setelah konflik dan tsunami yang terjadi di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya telah terjadi perubahan dimasyarakat itu sendiri, seperti perubahan lingkungan memberikan pengaruh pada perubahan perilaku individu. Pasca konflik pembangunan kembali fisik dan infrastruktur yang rusak adalah fenomena paling menonjol di Aceh. Pembangunan tersebut telah membuka dan memberikan lapangan pekerjaan di sector nonformal kepada masyarakat sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat pada masa tersebut. Setelah melewati masa konflik rehabilitasi dan rekonstruksi selama 14 tahun dengan menghabiskan dana milyaran rupiah. Banyak usaha yang telah dilakukan terutama di sector ekonomi dan pembangun yang dilakukan oleh pemerintah

Aceh sebuah daerah yang mempunyai partai politik local setelah perdamaian terjadi partai politik local adalah sebuah partai politik yang hanya ada di daerah, pemilihan partai politikpun hanya ada di daerah asal partai politik tersebut. Partai politik local mempunyai tujuan melindungi dan memajukan hak ekonomi, sosial dan budaya.

## **A. Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini ada bagaimana gambaran keluarga korban konflik, program pemberdayaan apa saja yang diberikan terhadap korban konflik dan bagaimana dampak pemberdayaan terhadap korban konflik.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana potret keluarga korban konflik di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya?
2. Program pemberdayaan apa saja yang pernah/sudah diberikan oleh pemerintah bagi keluarga korban pasca konflik di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya?
3. Bagaimana dampak pemberdayaan terhadap keluarga korban pasca konflik di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya?

## **C. Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui gambaran keluarga korban konflik di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya.
2. Untuk mengetahui pemberdayaan apa saja yang pernah/sudah diberikan oleh pemerintah bagi keluarga korban pasca konflik di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya.
3. Untuk mengetahui dampak pemberdayaan terhadap keluarga korban pasca konflik di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat praktis yaitu menjadi informasi tambahan mengenai pemberdayaan pada keluarga korban konflik.
- b. Manfaat teoritis yaitu dapat menambah wawasan tentang objek pengetahuan mahasiswa Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari peneliti-peneliti sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan maupun kelebihan yang sudah ada. Selain itu peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun dari skripsi.

Kajian pustaka merupakan sebuah kajian yang mengkaji tentang pokok-pokok pembahasan yang berkaitan dengan masalah penulis kaji. Kajian pustaka yang penulis buat untuk menguatkan penulis dalam sebuah penelitian bahwa yang penulis teliti belum pernah diteliti atau tidak sama dengan orang lain teliti. Namun setelah penulis melakukan studi kembali, penulis mendapatkan ada beberapa karya ilmiah atau jurnal dari beberapa tulisan tersebut membahas topik yang berhubungan dengan tulisan ini diantaranya:

Dalam jurnal Nasruddin yang berjudul: *“Pengaruh Konflik GAM-RI Terhadap Kehidupan Beragama, Sosial, dan Politik Rakyat Aceh(1976-2005)* dalam skripsi ini membahas konflik antara GAM-RI sekaligus menjelaskan pengaruhnya terhadap kehidupan beragama, sosial dan politik rakyat Aceh dari tahun 1976-2005. Kegunaan penelitian ini adalah untuk memberi kontribusi dan memperkaya khasanah sejarah tentang konflik GAM-RI dan pengaruhnya terhadap kehidupan beragama, sosial dan politik rakyat Aceh dalam disiplin sejarah Islam.

Penelitian ini menggunakan teori Karl Mark, konflik terjadi secara wajar sesuai dengan yang melekat dalam sifat manusia atau dalam sistem politik internasional konflik

dapat menjadi factor yang menyampingkan pengaturan, interaksi antara Negara-negara.<sup>10</sup>

Berdasarkan penelitian tersebut tidak ditemukan penelitian yang membahas tentang penetian. Perbedaan penelitian ini dengan peneltian diatas yang berkaitan dengan korban konflik adalah penelitian ini lebih cenderung kepada pemberdayaan sosial dan gambaran korban konflik.

Dalam tulisan Suadi Zainal yang berjudul “*Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial Politik di Era Desentralisasi*” dalam jurnal ini membahas menganalisis konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia melalui (Memorandum Of Understanding/moU) Helsinki yang berimplikasi terhadap pergantian undang-undang bagi Aceh. Dalam jurnal ini menunjukkan bahwa moU Helsinki hanya membawa perdamaian negative kepada Aceh, karena pelaksanaannya hanya melalui Undang-Undang Pemerintah (UUPA) Aceh No.11 tahun 2006. Karena tidak mentransformasi struktur dan hubungan pemerintah daerah Aceh dan pemerintah daerah Indonesia menjadi seimbang walaupun UUPA telah memberi peluang bagi pembangunan ekonomi dan sosial politik di Aceh. Perjanjian damai ( moU Helsinki) dan UUPA telah dijalankan dan menghasilkan kompromi serta consensus dalam sosio-politik diAceh. Tulisan ini menggunakan kualitatif.<sup>11</sup>

Berdasarkan penelitian ini dan kajian yang diuraikan tersebut belum ditemukan persamaan yang membahas tentang potret keluarga korban konflik dan pemberdayaan sosial karena kajian tersebut lebih kepada perdamaian.

---

<sup>10</sup>Nasruddin, *Pengaruh Konflik GAM-RI Terhadap Kehidupan Beragama, Sosial dan Politik Rakyat Aceh*, UIN Sunan Kalijaga(1976-2005), 2014.

<sup>11</sup>Suadi Zainal, *Tranformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi*, 2015.

Dalam tulisan Lambang Trijono yang berjudul “*Pembangunan Perdamaian Pasca-konflik di Indonesia: Kaitan Perdamaian, Pembangunan dan Demokrasi Dalam Pengembangan Pasca-konflik*” dalam jurnal ini membahas tentang Setelah perjanjian damai di Indonesia sekarang di era paska konflik, banyak konflik diberbagai daerah di Indonesia saat ini berkurang/mereda baik karena telah dicapainya kesepakatan damai maupun karena sebab-sebab lainnya. Demokrasasi dan desentralisasi membawa perbaikan pada kondisi sosial, ekonomi dan keamanan dimasyarakat. Tulisan ini membahas tantangan pasca konflik diberbagai wilayah Indonesia, pendekatan dan strategi pembangunan perdamaian pasca konflik dalam rangka landasan perdamaian untuk mencapai konsolidasi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan.<sup>12</sup>

Berdasarkan penelitian dan kajian diatas tidak terdapat persamaan dengan penelitian ini karena perbedayaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya adalah penelitian ini lebih kepada potret keluarga korban konflik dan pemberdayaan sosial di Kecamatan panga Kabupaten Aceh Jaya.

Dalam tulisan Kurnia Jayanti yang berjudul “*Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka di Aceh Dengan Pemerintah Pusat di Jakarta Tahun 1976-2005*”, dalam jurnal ini menganalisis konflik vertikal antara gerakan Aceh merdeka (GAM) dengan pemerintah pusat pada masa orde baru hingga masa reformasi (1976-2005) dalam penelitian ini membahas sejarah yang dilalui oleh GAM, faktor yang menyebabkan rakyat Aceh yang ingin melepaskan dirir dari

---

<sup>12</sup> Lambang Trijono, *Dalam Jurnal Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik di Indonesia: Kaitan Perdamaian, Pembangunan dan Demokrasi Dalam Pengembangan Pasca-5. 5.*

indonesia, upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik.<sup>13</sup>

Berdasarkan penelitian sebelumnya maka peneliti tidak mendapatkan persamaan dengan penelitian ini penelitian sebelumnya lebih cenderung kepada sejarah konflik sedangkan penelitian ini lebih cenderung kepada pemberdayaan sosial.

Dalam tulisan Munawar Noor yang berjudul “*Pemberdayaan Masyarakat*” dalam jurnal ini membahas mengenai pembedayaan masyarakat adalah sebagai konsep pembangunan ekonomi dengan nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang pertama menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang, yang kedua memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya, yang ketiga melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.<sup>14</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian dan berbagai kajian yang diuraikan tersebut belum ditemukan penelitian secara khusus membahas tentang penelitian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan korban konflik ialah penelitian ini lebih cenderung kepada potret keluarga korban konflik dan pemberdayaan sosial beserta program-program terhadap keluarga korban konflik.

---

<sup>13</sup> Trijono Lambang, *Dalam Jurnal Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik di Indonesia: Kaitan Perdamaian, Pembangunan dan Demokrasi Dalam Pengembangan Pasca-Konflik*, Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2009.

<sup>14</sup> Munawar Noor, *Pemberdayaan Masyarakat*, Vol I, No 2, Jurnal Fisip, Semarang: 2011.

## B. Landasan Teori

### 1. Teori Pemberdayaan Menurut Surjono & Nugroho

Dalam Penelitian ini penulis mengambil teori pemberdayaan Surjono & Nugroho. Pemberdayaan adalah *Empowerment*, dan memberdayakan disebut *empower* yang berarti berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki makna sebagai proses upaya menguatkan atau memampukan yang lemah.<sup>15</sup>

Menurut Surjono & Nugroho, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat khususnya yang kurang mampu atau kurang akses terhadap pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan kehidupan mereka. Pemberdayaan merupakan alat untuk mencapai tujuan memperkuat kapasitas organisasi/kelompok mereka agar mampu mengubah keadaan sekarang, memiliki kekuatan untuk mendorong terjadinya perubahan besar yang sangat diperlukan masyarakat.<sup>16</sup> sehingga sebagian masyarakat yang masih hidup dibawah kemiskinan. pemberdayaan adalah bertujuan untuk meningkatkan, mengembangkan kemampuan dan kemandirian dalam konsep pemberdayaan masyarakat adalah membangun dan memelihara kelangsungan hidup manusia berdasarkan kemampuannya sendiri secara berkelanjutan.<sup>17</sup> Model-model pemberdayaan yaitu proyek pendapatan petani dan nelayan kecil, raskin dan juga model kemitraan, dll.

---

<sup>15</sup>Saifuddin Yunus dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Pasca Konflik Aceh*, Bandar Publishing, Banda Aceh: 2015.

<sup>16</sup> Dra. Risyanti Riza, *Pembedayaan Masyarakat*, Sumedang, Alqaprint Jatinangor, 2006. Hal 17

<sup>17</sup>Munawar Noor, *Pemberdayaan Masyarakat*, Juli 2011. Hal 88-91

Dalam penelitian ini peneliti mengambil teori pemberdayaan karena masyarakat Panga mengalami trauma yang mendalam pasca konflik antara GAM dengan pemerintah karena berbagai tindakan kekerasan baik dalam segi fisik maupun dalam segi material yang dilakukan oleh pemerintah terhadap korban konflik. Maka model-model pemberdayaan Surjono & Nugroho sesuai dengan apa yang di alami oleh korban konflik seperti bantuan yang disalurkan oleh Pemerintah untuk masyarakat yaitu meliputi proyek pendapatan petani, proyek pendapatan nelayan, raskin dan juga model kemitraan, dll.

Pemberdayaan bisa dimaknai sebagai segala upaya untuk membebaskan masyarakat dari keterbatasan yang menghasilkan situasi dimana kesempatan-kesempatan ekonomi tertutup bagi mereka. Pemberdayaan mempunyai berbagai definisi yaitu mengembangkan, memberdayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah. Jadi tujuan pemberdayaan adalah yang pertama, melepaskan masyarakat dari keterbelakangan, baik dalam konteks ekonomi, sosial dan politik. Kedua, memperkuat posisi lapisan masyarakat struktur kekuasaan.<sup>18</sup>

Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat adalah dalam hal akses modal, baik yang petani, buruh, pengusaha kecil dan pengusaha menengah, tetapi ketika mereka membutuhkan modal, mereka diperlakukan tidak adil oleh lembaga keuangan. Contohnya yang lebih umum problem yang dihadapi masyarakat tunadaya seperti salah satu tujuan dari pemberdayaan dalam bidang ekonomi adalah meningkatnya pendapatan masyarakat lemah,

---

<sup>18</sup>Sri Widayanti, *Pemberdayaan Masyarakat*, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 1, No 1, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Padang, Januari-Juni 2012. Hal 95

pendapatan masyarakat biasanya dari gaji/upah mereka hanya menerima upah/gaji rendah. Karena mereka memiliki keterampilan yang terbatas dan sikap mental yang buruk. Karena disebabkan pelayanan pendidikannya pada umumnya buruk. Begitu pula masyarakat yang tunadaya tidak memiliki usaha atau kalaupun memiliki usaha mereka menghadapi kendala modal atau tanah.<sup>19</sup>

Para ahli menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tidak langsung terkait dengan tujuan pembangunan seperti penciptaan lapangan kerja, penghapusan kemiskinan dan kesenjangan serta peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar. Terkait dengan penelitian ini, dengan menggunakan teori tersebut nantinya dapat menganalisis, mengungkapkan bagaimana potret keluarga korban konflik dan program pemberdayaan bagi masyarakat korban konflik dan dampak pemberdayaan dari pemerintah itu sendiri.

### **C. Defenisi Operasional**

#### **1. Keluarga**

Keluarga merupakan sebuah sistem sosial terkecil yang terdiri dari individu-individu yang tergabung dalam satu ikatan perkawinan, hubungan darah, adopsi yang hidup bersama, berinteraksi satu sama lain dalam peranannya dan menciptakan serta mempertahankan suatu kehidupan bermasyarakat. Memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anaknya yang meliputi agama, psikologi makan dan minum dan sebagainya, tujuan

---

<sup>19</sup>Erni Febrina Harahap, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional Yang Tangguh dan Mandiri*, Vol 3, No 2, Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta, Padang: mei 2012. Hal 83-89

membentuk keluarga adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anggota keluarga.<sup>20</sup>

## 2. Kehidupan keluarga

Menurut Rahmad keluarga merupakan dua orang atau lebih yang berkaitan dengan kelahiran, perkawinan, yang tinggal bersama-sama. Dengan demikian sebuah keluarga dapat terdiri dua atau lebih orang dewasa yang tinggal bersama dengan saudara kandung, orang tua, anak-anak atau dua orang dewasa yang dihubungkan oleh tali perkawinan.

Perubahan konsep struktur keluarga memengaruhi fungsi-fungsi peran dan hubungan para anggota keluarga. Batasan tentang keluarga inti akan membawa relasi tanggung jawab suami-istri pada pengasuhan anak. Seorang keluarga yang terdiri dari suami-istri serta anak-anak disebut sebagai keluargainti, keluarga mendasarkan pola interaksi istri bergantung pada suami dan anak-anak bergantung pada pada kasih sayang orang tua mereka.<sup>21</sup>

## 3. Korban Konflik

Menurut Arif Gosita korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>22</sup>

Korban pada dasarnya tidak hanya perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau

---

<sup>20</sup> Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga*, Fakultas Ekologi Indonesia-Institut Pertanian Bogor: 2013. Hal 1

<sup>21</sup>Rahmad, *Studi Gender dan Anak, Kelurga dan Pola Pengasuhan Anak*, Yinyang Vol. 5 No 1, STAIN Purwokerto: 2010.Hal 2

<sup>22</sup>Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademik Presindo, (Jakarta: 1993). Hal 63

penderitaan terhadap diri atau kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya anggota keluarga.

#### 4. Konflik

Stephen P. Robbins menjelaskan bahwa konflik adalah sebuah proses yang dimulai ketika suatu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif, sesuatu yang menadi kepedulian atau kepentingan pihak pertama. Konflik juga merupakan sebagai akibat situasi dimana keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlawanan antara satu dengan yang lain sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu, terjadinya ketidakcocokan tujuan yang ingin dicapai. konflik akan terjadi apabila ada perbedaan pemahaman antara dua orang atau lebih terhadap berbagai perselisihan, ketegangan, kesulitan-kesulitan diantara para pihak yang tidak sepaham.<sup>23</sup>

#### 5. Pemberdayaan Sosial

Adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat dan upaya menjadikan suasa kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif baik didalam kehidupan keluarga, masyarakat, bidang pilitik, ekonomi, budaya dan lain-lain.<sup>24</sup>pembserdayaan merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan dalam mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

#### 6. Sosial

Adalah ilmu yang mempelajari hubungan atara manusi, dalam kelompok-kelompok. Proses sosial adalah

---

<sup>23</sup>Andri Wahyuni, Dalam Jurnal Konsep, Teori, dan Permasalahan. Hal 1

<sup>24</sup>Sri Widayanti, *Pemberdayaan Masyarakat*, Hal 98

pengaruh timbal balik antara manusia diberbagai kkehidupan bersama, contoh interaksi sosial merupakan perwujudan dari adanya kontak sosial dan komunikasi. Jika dua orang bertemu, interaksi sosial dimulai pada saat itupun mereka saling menyapa, berjabat tangan dan saling berbicara. Interaksi sosial merupakan kunci kehidupan sosial.

Kelompok sosial ada beberapa yaitu yang pertama individu diartikan sebagai “seoranh manusia” yaitu sebagai manusia perseorang. dalam kehidupan sehari-hari menunjuk pada pribadi orang yang subjek yang mempunyai kehendak, subjek yang mempunyai kebebasan, yang memberi arti pada sesuatu yang mampu menilai tindakan dan hasil tindakannya. yang kedua keluarga adalah kelompok orang yang ada hubungan darah atau perkawinan seperti ibu bapak dan anak-anaknya.yang ketiga masyarakat merupakan suatu kesatuan sosial yang mempunyai ikatan-ikatan kasih sayang yang erat, dan pergaulan hidup manusia( sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan aturan tertentu.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Dr.Mukmina, *Dalam Jurnal Dasar-dasar Ilmu Sosial*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas UNY: 2015. Hal 10

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode deskriptif adalah bagian dari penelitian kualitatif.<sup>26</sup> Metode penelitian adalah untuk memberikan gambaran secara sistematis dan akurat dari fenomena-fenomena yang ada,<sup>27</sup> atau hubungan-hubungan antara fenomena yang diteliti apa adanya tanpa perlakuan-perlakuan khusus.

Berkaitan dengan hal tersebut, alasan peneliti menggunakan metode deskriptif ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai potret keluarga korban konflik dan pemberdayaan sosial dikecamatan Panga kabupaten Aceh Jaya adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana program pemerintah terhadap korban konflik dan bagaimana gambaran keluarga korban konflik dan dampak pemberdayaan terhadap keluarga korban pasca konflik.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan objek sekaligus tempat dimana peneliti melakukan penelitian guna untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Adapun lokasi penelitian ini di kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya desa Tuwi Eumpeuk, Tuwi Kayee, Tuwi Kareung.

---

<sup>26</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, :Alfabeta, 2010).  
Hal 68

<sup>27</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, :PT Remaja Rosdakarya, 2007). Hal 165

Kecamatan panga terbentuk pada tahun 1998, Kecamatan Panga merupakan salah satu Kecamatan dari Kabupaten Aceh Jaya. Kecamatan ini berbatasan dengan kecamatan Teunom di arah Timur, Kecamatan Krung Sabee di arah Barat. Luas Kecamatan Panga 30.734 hektar, memiliki 20 desa/ lurah, yang terdiri dari 2 mukim, 45 dusun. Dikecamatan Panga terdapat pasi Panga, pasi Aron Patah dan laot bhee yang ramai dikunjungi saat hari-hari besar sebagai tempat wisata keluarga, jarak dari kecamatan ke kabupaten/ ke kota yaitu 22 km sekitar 1 jam.

### **C. Informan Penelitian**

Informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena yang diangkat dalam penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Camat Panga, pegawai Dinas Sosial, pegawai BRA (Badan Reintegrasi Aceh), pegawai PA (Partai Aceh), korban konflik yaitu 5 orang yang menerima bantuan dan 4 orang yang tidak menerima bantuan, 3 orang Geuchik, dan 1 orang wakil panglima GAM.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Observasi**

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang ingin diteliti. <sup>28</sup>Observasi dilakukan peneliti dengan cara langsung turun kelapangan untuk mengamati gambaran keluarga korban konflik dan program-program yang dijalankan oleh pemerintah Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya, dan dampak pemberdayaan terhadap korban konflik dalam pengamatan

---

<sup>28</sup> Supadri dalam buku Muh.Fitrah dan Lutfiyah, *Metode Penelitian: Kualitatif, Tindakan dan Studi Kasus*, Cv Jejak: Jawa Barat. 2017. Hal 72

ini peneliti merekam, mencatat, baik dengan terstruktur maupun semistruktur (misal mengajukan pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti) dalam penelitian ini peneliti mengamati keluarga korban konflik dan pemerintah di Kabupaten Aceh Jaya dan pemerintah Kecamatan Panga dalam memberdayakan korban konflik.

## b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana wawancara dapat dikatakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.<sup>29</sup> Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana wawancara dapat dikatakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.<sup>30</sup>

Wawancara dilakukan dengan orang-orang yang dilakukan sebagai informan, bertatap muka langsung dengan berpedoman dengan menggunakan *in depth interview* yaitu dimana pelaksanaannya lebih bebas, tujuannya untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.<sup>31</sup>

Dalam wawancara terbagi dua jenis, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam skripsi ini peneliti mengambil kedua jenis wawancara tersebut

---

<sup>29</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014). hlm. 372

<sup>30</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Kencana: Jakarta. 2014. Hal, 372

<sup>31</sup>Djam'am Satori, dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Alfabeta, 2011).Hal 43

yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur mendalam.

Wawancara terstruktur merupakan teknik wawancara dimana pewawancara mempersiapkan daftar pertanyaan, atau daftar isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara. Dalam wawancara ini peneliti akan mewawancarai responden pegawai Dinas Sosial, pegawai PA, pegawai BRA, Camat Panga, wakil panglima GAM, geuchik gampong dan beberapa masyarakat korban konflik.

Wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang di gunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan di tanyakan.<sup>32</sup>

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mendokumentasikan sesi wawancara bersama pegawai BRA (Badan Reintegrasi Aceh), pegawai PA (Partai Aceh), pegawai Dinas Sosial, Camat Panga,

---

<sup>32</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung. 2010. Hal, 140

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung. 2016. Hal, 240

Geuchik, Wakil Panglima GAM dan beberapa korban konflik.

#### d. Instrumen

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian. Instrumen dalam penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan. kehadiran penelitian ini sangat penting karena penelitian tidak dapat diwakili oleh pihak manapun peneliti menggunakan metode observasi, dan wawancara.

Apabila terjadi sesuatu yang mengakibatkan peneliti tidak dapat hadir, maka peneliti ini akan di tunda untuk sementara waktu sampai peneliti dapat hadir kembali. Peneliti tidak dapat memungkiri akan kekurangan yang dimiliki. Maka agar terlaksananya proses penelitian ini, maka penelitian juga akan mengajar seseorang rekan (teman) peneliti yang ikut membantu peneliti dalam terlaksananya proses penelitian.

#### E. Sumber Data

Sumber data adalah subjek penelitian dimana data menempel, Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer, adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini, Camat Panga, korban konflik di Kecamatan Panga, pegawai Dinas Sosial, pegawai BRA,

- pegawai PA, geuchik dan wakil panglima GAM, dan penelitian mengobservasi ke 3 keluarga korban konflik.
- b. Sumber data sekunder, adapun yang menjadi sumber data primer adalah dari jurnal, buku, skripsi.

## F. Teknik Analisis Data

Bogdan menjelaskan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>34</sup> Susan Stainback mengemukakan bahwa analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.<sup>35</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan maupun dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Milles dan Huberman mengemukakan teknik analisis data meliputi langkah-langkah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Reduksi data

---

<sup>34</sup> Bogda dalam buku Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Hal, 244

<sup>35</sup> Susan Stainback dalam buku Sugiyono,, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Hal, 224

<sup>36</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Hal 407

Reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat dalam catatan lapangan. Reduksi data adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis data. Peneliti memilih data mana akan diberi kode, mana yang ditarik keluar, dan pola rangkuman sejumlah potongan atau apa pengembangan ceritanya merupakan pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam satu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi.

b. Penyajian data (*Data Display*)

Kegiatan kedua dalam teknik analisa data yaitu penyajian data. penyajian data dalam konteks ini adalah kumpulan informan yang tersusun, yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian dalam penelitian ini yaitu teks naratif yang menjelaskan tentang potret keluarga korban konflik dan pemberdayaan sosial.

c. Penarikan kesimpulan

Kegiatan ketiga dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan. Sejak awal pengumpulan data, peneliti telah mencatat dan memberi makna sesuatu yang dilihat atau diwawancarainya. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.<sup>37</sup>

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan

---

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabet). Hal 242-244

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Tetapi apabila tidak didukung oleh bukti-bukti maka masalah dan umusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.<sup>38</sup>

#### **D. Sistematika Penulisan**

Pembahasan pada skripsi ini terdiri atas lima bab, namun sebelumnya terlebih dahulu dilampirkan halaman judul, halaman pengesahan, halaman persembahan, abstrak, kata pengantar dan daftar isi. Setelah bab 5 akan disertakan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Adapun pembagian bab perbab dalam penulisan skripsi ini adalah sebagaimana yang telah teruraikan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan menguraikan secara spesifik yang terdiri dari latar belakang masah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah landasan teori, isi bab ini adalah terdiri dari pengertian pemberdayaan social konseptual teori dari landasan teori dan tinjauan pustaka.

Bab III adalah metode penelitian, dalam bab ini dibahas tentang metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.

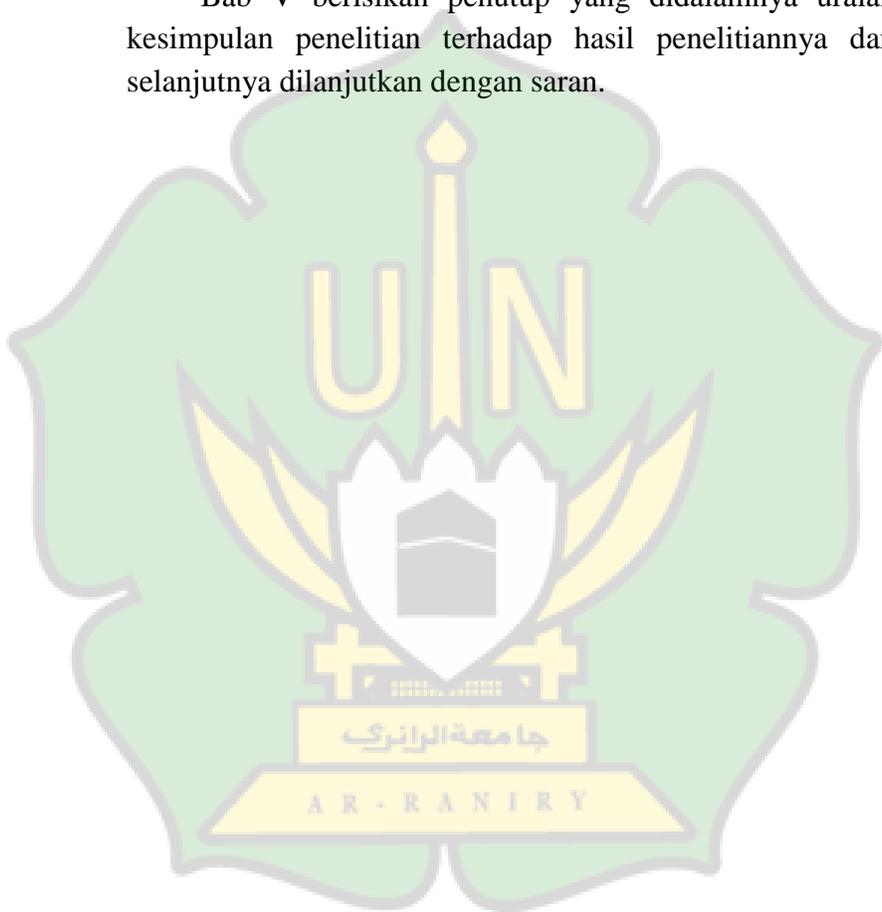
Bab IV adalah hasil penelitian, bab ini merupakan tentang hasil penelitian yang telah diperoleh yang terdiri dari gambaran lokasi penelitian, temuan penelitian

---

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantutatif dan R&D*. Hal 245-252

dilapangan. Yang mencakup pertanyaan Tanya jawab, yaitu tentang potret Keluarga korban konflik dan pemberdayaan sosial di Aceh Jaya, yang terdiri dari bagaimana pemberdayaan social terhadap keluarga korban konflik sehingga dapat dianalisis penulis.

Bab V berisikan penutup yang didalamnya uraian kesimpulan penelitian terhadap hasil penelitiannya dan selanjutnya dilanjutkan dengan saran.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Wilayah Panga Kabupaten Aceh Jaya**

Kabupaten Aceh Jaya salah satu kabupaten yang terdapat di Aceh, yang menggambarkan kondisi umum wilayah dan potensi melalui beberapa aspek yaitu geografi, sumber daya alam, secara geografi wilayah Aceh Jaya memiliki luas 387,272.36 hektar dengan ibu kota yang terletak di Calang yang berjarak 156 km dari kota Banda Aceh. Wilayah Aceh Jaya merupakan bagian pantai barat dan daratan kepulauan sumatera yang membentang dari barat ketimur mulai kaki gunung geurutee (perbatasan dengan Aceh Besar) sampai perbatasan dengan Aceh Barat.<sup>39</sup>Kabupaten Aceh Jaya terbagi sebanyak 9 wilayah yaitu Kecamatan Jaya, Indra Jaya, Sampoinit, Darul Hikmah, Setia Bakti, Panga, Krung Sabee, Teunom dan Paiee Raya.

##### **a. Kondisi alam di Aceh Jaya**

Sumber daya dan lingkungan yaitu sebagai modal pembangunan, penopang sistem kehidupan. Sumber daya alam di Kabupaten Aceh Jaya yaitu bidang pertahanan, lingkungan hidup, perencanaan pembangunan dan penataan ruang. Kondisi lingkungan hidup di Aceh Jaya masih ada pencemaran udara, dan pembuangan air limbah.

---

<sup>39</sup> *Gambaran Umum dan Kondisi Wilayah*, Dokumen RPIJM Kabupaten Aceh Jaya, 2014-2018. Hal 2-3

## **b. Kondisi ekonomi masyarakat**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Jaya menunjukkan kondisi perekonomian yang cenderung stabil. Pertumbuhan ekonomi yang positif ini tidak lepas dari kerja keras pemerintah, bantuan LSM dalam dan luar negeri serta keinginan masyarakat yang tinggi untuk membangun kembali sektor-sektor produktif. Kabupaten Aceh Jaya khususnya di Kecamatan Panga mata pencariannya sehari-hari adalah budidaya pertanian baik jenis tanaman pangan seperti padi, palawija, buah-buahan dan sayuran maupun jenis tanaman seperti karet, kelapa sawit dan Berbagai lahan perternakan karena daerah ini masih memiliki padang rumput yang luas.<sup>40</sup>

Wilayah Panga merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Jaya hasil pemekaran kecamatan Teunom. Kecamatan panga terbentuk pada tahun 1998, Kecamatan ini berbatasan dengan kecamatan Teunom di arah Timur, kecamatan Krung Sabee di arah Barat. Luas Kecamatan Panga 30.734 hektar, memiliki 20 desa/ lurah, yang terdiri dari 2 mukim, 45 dusun. Di kecamatan Panga terdapat pasi Panga, pasi Aron Patah dan laot bhee yang ramai dikunjungi saat hari-hari besar sebagai tempat wisata keluarga, jarak dari kecamatan ke kabupaten/ ke kota yaitu 22 km sekitar 1 jam. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kecamatan Panga adalah laki-laki 3,848 jiwa perempuan 3,712 jiwa.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> *Gambaran Umum dan Kondisi Wilayah*, Dokumen RPIJM Kabupaten Aceh Jaya. 2014-2018

<sup>41</sup> Data Kantor Camat, 2019. Hal 1-4

### c. **Visi dan misi kecamatan Panga**

Visinya adalah terwujudnya pelayanan prima, paten, berkualitas, harmonis, sehat islami jasmani secara merata di kecamatan Panga.

#### Misi

- Terciptanya suasana aman tertib dan berupaya menghilangkan hambatan transportasi keseluruh pelosok gampong.
- Terlaksananya proses pendidikan di dalam masyarakat menurut tingkat jenjang yang ada.
- Terciptanya masyarakat yang mampu bersaing produktifitasnya yang dapat dipublikasikan dalam dan luar daerah.

## **B. Potret keluarga korban konflik di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya**

### **a. Potret keluarga ibu Nurma**

Pada saat terjadinya konflik salah satu dari keluarga ibu nurma terbunuh, yang menjadi korban ialah suaminya dan jenazahnya ditemukan di kampung Kuala Bakong yang berjarak ±15 km dari tempat tinggalnya, kemudian jenazahnya terpaksa dikebumikan di kampung Pasi Laot dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk dibawa ke kediamannya. Pembunuhan itu terjadi karena anggota TNI menganggap suami dari ibu Nurma sebagai anggota GAM, setelah terbunuh suaaminya pihak TNI juga membakar tempat tinggal keluarga ibu Nurma, setelah kejadian itu ibu Nurma pindah kerumah orang tuanya.

Sedangkan Ibu Nurma dipaksa untuk mengakui bahwa suaminya seorang anggota GAM dan disuruh

berbagai hal lainnya yang mempunyai tujuan untuk melegitimasi aksi kekerasan yang mereka lakukan . Ibu Nurma mempunyai dua orang anak yang pertama kelahiran 1999 dan yang kedua pada tahun 2001 pada saat meninggal ayahnya anak yang kedua masih berusia 20 bulan bahkan ia tidak mengenal sosok sang ayah, setelah suaminya meninggal ibu nurma menjadi tulang punggung keluarga untuk menafkahi kedua buah hatinya.

Gambaran keluarga ibu Nurma pasca konflik bisa dikatakan sebagai keluarga miskin dan mengalami trauma namun, setelah adanya pemberdayaan dan bantuan dari pemerintah ibu Nurma membuka usaha gas elpiji, dengan usaha tersebut ia bisa menyekolahkan anak-anak dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Hidup ibu Nurma sekarang lebih nyaman tidak ada lagi banyang-bayang masa lalu saat konflik,

Ibu Nurma sekarang sudah memiliki rumah sendiri berkat bantuan BRA, anaknya yang pertama saat ini sedang menempuh pendidikan perguruan tinggi di UIN Ar-raniry dengan dana beasiswa dan anak yang kedua sedang menempuh pendidikan sekolah menengah pertama di Panga.<sup>42</sup>

#### **b. Potret keluarga ibu Ani**

Ibu Ani pada masa konflik mengalami kejadian yang begitu pahit dikarenakan suaminya adalah seorang GAM, ibu Ani beserta anak-anaknya ditinggal oleh suami yang harus bersembunyi ketika berlangsungnya konflik, jika ingin bertemu harus bersembunyi-sembunyi agar tidak di ketahui oleh pihak TNI, saat ada anggota TNI yang kerumah mencari suaminya jika suaminya tidak ada dirumah mereka menuduh ibu Ani menyembunyikan

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Nurma Pada Tanggal 17 Desember 2019

suaminya dan ibu Ani disiksa secara fisik seperti dipukuli dengan senjata.

Pasca konflik suami ibu Ani mulai sakit-sakitan dan akhirnya meninggal akibat sakit yang dideritanya dan beliau meninggalkan dua orang anak yang masih kecil , setelah suaminya meninggal ia mendapat pekerjaan di kantor camat sebagai karyawan bagian umum dan ia juga mendapat bantuan mesin penggiling kelapa gongseng untuk kerja sampingannya dalam memenuhi kebutuhan hidup kedua anaknya .<sup>43</sup>

### **c. Potret keluarga ibu Mariah**

Ibu Mariah pada masa konflik ia bersama anak-anaknya harus bersembunyi dari anggota TNI karena suaminya sebagai anggota GAM, suaminya dibunuh dengan cara ditembak, disiksa hingga tak lagi bernyawa, kemudian jasadnya ditemukan di hutan dan dibawa pulang dalam keadaan yang mengerikan.

Beberapa tahun setelah konflik tidak adanya dana bantuan dari pemerintah untuk Ibu Mariah seperti rumah bantuan, modal usaha dan lainnya, ibu Mariah mempunyai 2 orang anak yang pada saat itu tengah menempuh pendidikan, mereka bekerja sendiri untuk membiayai pendidikannya hingga selesai dan sekarang sudah bekerja, anak pertama saya bekerja di kantor Dinas Sosial dan anak kedua saya menjadi juru bicara PA Aceh Jaya, setelah perdamaian hingga tahun 2019. Ibu Mariah dianggap keluarga yang berada, memiliki rumah yang besar, anaknya

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Ani Pada Tanggal 17 Desember 2019

seorang pegawai negeri yang mencukupi kebutuhan sehari-hari.<sup>44</sup>

## **C. Program Pemberdayaan Pemerintah Bagi Keluarga Korban Konflik**

### **a. Jenis-Jenis Program Pemberdayaan Pemerintah**

Pelaksanaan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat menjadi prioritas bagi pemerintah Aceh, program pemberdayaan salah satunya bisa dilakukan dengan cara menciptakan program yang dapat memberikan pekerjaan kepada masyarakat, sehingga mereka mendapatkan penghasilan yang layak guna memberikan kemakmuran bagi masyarakat korban konflik.<sup>45</sup>

Seperti halnya yang dikatakan oleh informan Hanafiah yang bahwasannya program yang diberikan BRA untuk korban konflik seperti:

“untuk pembukaan lahan bagi tapol (tahanan politik) dan napol (narapidana politik) Aceh mungkin ada beberapa masyarakat Panga yang ketika konflik ditahan sehingga BRA membuat program tersebut, dikecamatan hanya mencari informasi yang pertama siapa-siapa yang menjadi tahanan ketika konflik, yang kedua berdiskusi dengan geuchik untuk mencari lokasi lahan untuk korban jadi dikampung mana yang ada lahan luas tetapi masih kosong yang bisa hibah kepada korban tapol dan napol , dan ada juga program lainnya”.

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Mariah Pada Tanggal 17 Desember 2019

<sup>45</sup> Wawancara dengan Wahyul Hadi Pegawai Dinas Sosial Pada Tanggal 20 Desember 2019

Namun berbeda dengan Dinas Sosial seperti yang diungkapkan oleh informan A.Wahyul Hadi beliau berpendapat bahwa:

“Di dinas sosial ada program untuk korban konflik, seperti tahun 2019 ini ada bantuan sosial UEP (Usaha Ekonomi Produktif) bagi korban konflik yang menerima bantuan tersebut ada 23 orang tahun ini. Bantuan tersebut berupa palawija 6 kelompok, menjahit 3 kelompok, kelontong 7 kelompok, peralatan kue ada 7 kelompok jadi perkelompok terdiri dari 6 orang korban konflik hanya itu saja program dari dinas sosial untuk tahun 2019 jadi kedepannya kami belum mengetahui ataupun belum merancang program terhadap korban konflik”.

Adapun penjelasan dari informan Wahyul Hadi dan informan Hanifah kedua informan menjelaskan yang bahwasannya ada beberapa program yang telah dilaksanakan atau yang telah dirancang oleh pemerintah yang bahwa seperti yang dibawah ini:

Ada beberapa program pemberdayaan pemerintah yaitu:

1. Memberikan lahan kepada exs-combatan dan korban.
2. Mendirikan rumah bantuan bagi masyarakat yang rumahnya dibakar pada saat konflik.
3. Memberikan UEP (Usaha Ekonomi Produktif) kepada korban seperti palawija, mesin jahit, usaha kelontong dan peralatan membuat kue.
4. Memberikan bantuan berupa kendaraan seperti becak.
5. Diberikan mesin penggilingan kelapa gongseng, mesin penggiling padi, mesin perontok padi dan mesin penggiling kopi.
6. Modal usaha perbengkelan.
7. Program modal kelompok tambak.

## 8. Program peternakan sapi dan kambing.<sup>46</sup>

Dari 8 program yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dilaksana yaitu yang pertama mendirikan beberapa rumah akibat korban konflik di beberapa desa yang ada di kecamatan panga rumah yang dikeluarkan oleh pemerintah sekitar 20 unit diberikan khusus hanya kepada korban yang rumahnya terbakar pada masa konflik. Kemudian yang dilaksanakan di Kecamatan Panga adalah memberikan usaha ekonomi produktif kepada korban konflik seperti palawija, mesin jahit, usaha kelontong dan peralatan membuat kue. Dan pemerintah juga memberikan beberapa bantuan lainnya seperti becak, penggilingan padi, kelapa gongseng, mesin penggilingan kopi, modal usaha perbengkelan, dan yang terakhir adalah usaha modal kelompok tambak.

Pemerintah memberikan semua bantuan tersebut agar memudahkan masyarakat korban konflik dalam memenuhi kebutuhan yang mereka perlukan dalam sehari-hari dan membuka lapangan pekerjaan terhadap korban yang tidak mampu agar menghilangkan trauma yang dialami pada masa konflik. Program yang belum terlaksanakan yaitu lahan exs-combatan karena BRA tidak memiliki dana pada tahun ini.

Pemerintah daerah mengatakan bahwa kantor kecamatan memiliki peran untuk memfasilitasi antara desa-desa yang memiliki korban konflik dengan dinas sosial dan BRA, kecamatan sendiri hanya sebagai perantara/fasilitator penyambung antara pemerintah dinas sosial, BRA dengan korban konflik terkadang disamping memfasilitasi camat

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Wahyul Hadi Pegawai Dinas Sosial, Hanafiah Pegawai BRA Pada Tanggal 20 Desember 2019

juga bisa mengusulkan program-program tersebut berdasarkan usulan dari gampong-gampong, geuchik-geuchik dan aparat gampong karena mereka mengetahui kebutuhan warganya.

Camat mengusulkannya ke dinas sosial sehingga dinas sosial memberikan seperti program pengadaan becak untuk disabilitas, karena dikecamatan Panga ada korban cacat disabilitas akibat konflik, korban diberitahu oleh geuchik untuk melengkapi berkas-berkas yang diminta oleh kantor kecamatan agar kantor kecamatan bisa mengajukan bantuan becak terhadap dinas sosial.<sup>47</sup>

Program kedua yang di usulkan adalah mesin penggilingan kelapa gongseng yang diusulkan kepada DISPRINDAG (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) agar memberikan program tersebut, ketiga yang diusulkan adalah yang bergerak dibidang perbengkelan agar membuat proposal kepada Dinas Sosial agar diberikan modal untuk membuka bengkel. Terakhir yang diusulkan adalah korban yang bergerak dibidang perikanan agar membuat kelompok tambak untuk kemudian diajukan ke Dinas Perikanan usulan tersebut berdasarkan usulan dari geuchik dan warga korban konflik.

Dinas Sosial memiliki program untuk korban konflik pada tahun 2019 yaitu program UEP (Usaha Ekonomi Produktif) seperti palawija 6 kelompok, menjahit 3 kelompok, kelontong 7 kelompok, peralatan keu 7 kelompok. Perkelompok terdiri dari 6 orang, bantuan ini diberikan kepada 23 orang korban konflik.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Mawardi Camat Panga Pada 19 Desember 2019

<sup>48</sup> Wawancara dengan Wahyul Hadi Pegawai Dinas Sosial Pada Tanggal 20 Desember 2019

BRA memiliki beberapa program seperti rumah terbakar bagi korban yang mengalami korban harta pada masa konflik, untuk tahun 2020 adalah lahan exs-combatan seribu hektar untuk tapol/napol yaitu yang ditahan ditingkat daerah, yang dibawa kejawa pada masa konflik dan untuk korban konflik sesuai data, tahun 2019 program BRA adalah modal usaha dalam bentuk kelompok, bantuan seperti kelompok peternakan sapi, kelompok peternakan kambing dan bantuan perseorangan seperti bantuan mesin penggilingan padi, mesin perontok padi, mesin penggilingan kopi.<sup>49</sup>

BRA melanjutkan program yang telah dibuat oleh BRA provinsi, Kabupaten menyediakan lahan untuk korban, BRA memberikan bantuan kepada korban yang berhak menerima bantuan ,jumlah data batuan lahan exs-combatan tapol 60 orang, napol 36, korban konflik 99 orang berdasarkan data yang sudah diterima, dari semua data yang diperoleh tidak semua korban mendapatkan bantuan tapi data disaring lagi dan hanya 23 orang yang mendapat program bantuan tersebut.

## **b. Mekanisme Penyaluran Bantuan**

### **1. Persyaratan**

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh korban konflik di Panga adalah surat pernyataan dari geuchik bahwa benar sebagai korban konflik, surat rekom dari geuchik dan camat seperti surat keterangan tapol/napol jika terjadi cacat fisik harus memiliki surat dari dokter foto copy KTP, KK, umur mulai dari 19-59 tidak boleh lansia.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Hanafiah Pegawai BRA Pada Tanggal 20 Desember 2019

<sup>50</sup> Wawancara dengan Wahyul Hadi dkk Pada Tanggal 19-20 Desember 2019

## 2. Penyaluran

Disalurkan oleh pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat kemudian kepada pemerintah kabupaten, misalnya dari BRA provinsi membuat beberapa program yang harus dijalankan oleh BRA kabupaten, dari BRA kabupaten dilanjutkan kepada kantor camat dan kantor camat mencari data korban konflik melalui geuchik gampong yang kemudian diberikan kepada korban konflik.

## 3. Kegiatan sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan oleh dinas sosial menurut informan A.Wahyul Hadi,S.ST dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“kami melakukan sosialisasi terhadap korban konflik yaitu dengan bimbingan, pelatihan dan keterampilan karena kita memberikan bantuan sebagai bentuk pembinaan dengan adanya bantuan ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat korban konflik dan bisa juga untuk menjadikan korban konflik lebih mandiri dengan adanya bantuan ini. Agar masyarakat punya aktifitas dan menyibukkan diri dengan usahanya supaya trauma yang pernah dirasakan berkurang”.

Adapun penjelasan dari informan Wahyul Hadi dan informan Hanafiah menjelaskan bahwa Dinas Sosial melakukan sosialisasi seperti pelatihan, keterampilan usaha, pendampingan dan pembinaan sosial. Sebelum program diberikan pada korban, korban terlebih dahulu diberikan pembinaan serta bimbingan social sebagai pra kondisi sebelum program dilaksanakan oleh Dinas Sosial, sedangkan untuk keterampilan teknis diberikan oleh instansi yang terkait dalam pengembangan usaha kelompok, seperti

dari Dinas pertanian, peternakan, perdagangan dan perikanan.<sup>51</sup>

Dalam pemberdayaan ini masyarakat diberikan kebebasan dalam menentukan jenis usaha yang akan digarapnya sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Masyarakat korban konflik diberikan pemahaman tentang bagaimana mengelola usaha baik usaha pribadi maupun usaha kelompok supaya masyarakat bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Dengan adanya sosialisasi bisa membuat masyarakat korban konflik menyibukkan diri dengan hal-hal atau kegiatan yang positif agar tidak timbul pikiran-pikiran yang tidak diinginkan dan tidak mengingat masa lalu.

BRA menjelaskan manfaat dari program sosialisasi yang diberikan pemerintah, sosialisasi perlu dilakukan agar keluarga korban konflik mengetahui manfaat adanya bantuan supaya trauma yang dialami oleh korban pulih kembali karena harapan pemerintah ialah memulihkan trauma korban konflik dimasa lalu. Contohnya ada satu keluarga yang tidak memiliki penopang hidup akibat konflik, dengan adanya bantuan dari pemerintah maka trauma bagi korban bisa sedikit hilang. BRA melakukan sosialisasi melalui pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah agar korban konflik bisa berinteraksi dengan korban yang lain, sosialisasi ini membuat kehidupan korban lebih baik.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Wahyul Hadi Pegawai Dinas Sosial Pada Tanggal 20 Desember 2019

<sup>52</sup> Wawancara dengan Hanafiah Pegawai BRA Pada Tanggal 20 Desember 2019

Sosialisasi juga dilakukan dengan tujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat korban konflik tentang pentingnya memiliki pengetahuan seputar sosial atau kebersamaan dan dapat juga mempengaruhi cara berfikir masyarakat terhadap persoalan-persoalan kehidupan.

#### 4. Anggaran penyaluran

Seperti halnya yang diungkapkan oleh bapak Hanafiah BRA (Badan Reintegrasi Aceh) dalam wawancaranya mengatakan:

“BRA memiliki anggaran yang dikeluarkan berdasarkan yang telah dilobi karena anggaran dari pusat atau dari provinsi tidak khusus untuk BRA, seandainya pemerintah memberikan anggaran khusus untuk BRA, maka BRA bisa merancang program yang bermanfaat yang di berikan kepada korban, misalkan kita katakan 200 milyar jadi kalau seandainya di buat anggaran seperti itu kita bisa membuat sendiri program. Tahun ini BRA hanya memiliki dana 5 milyar untuk program modal usaha dan 200 juta untuk lahan exs-combatan yang diberikan kepada korban konflik, rancangan tahun 2020 semua program diperkirakan akan gagal karena ketidakjelasan anggaran”.

Adapun penjelasan dari bapak hanafiah bahwasannya Kantor camat Panga tidak memiliki anggaran untuk keluarga korban konflik, Akan tetapi kantor camat Panga hanya sebagai perantara/fasilitator. yang memiliki anggaran yaitu BRA, dalam tahun 2019 BRA memiliki anggaran senilai 5 milyar untuk program modal usaha, 200 juta untuk lahan exs-combatan untuk diberikan kepada korban konflik. Akan tetapi pada tahun 2020 semua program yang telah dirancang diperkirakan akan gagal karena tidak memiliki dana/ anggaran bisa dikatakan hanya memiliki dana seandainya saja, BRA Kabupaten tidak bisa

menjalankan programnya dengan baik karena ada kendala dana.<sup>53</sup>

## 5. Hambatan- hambatan dalam penyaluran

Hambatan dalam menyalurkan bantuan untuk korban konflik adalah hambatan dana, karena pemerintah tidak memiliki dana/anggaran yang besar, pemerintah hanya memiliki dana secukupnya untuk membuat program terhadap korban konflik sedangkan dana yang dibutuhkan untuk program pemberdayaan keseluruhan korban konflik membutuhkan dana dalam jumlah besar.<sup>54</sup>

### c. Respon Penerima dan Yang Tidak Menerima Bantuan Pemberdayaan

#### 1. penerima pemberdayaan

Salah satu pendapat dari informan yaitu ibu Nurma dalam wawancaranya menjelaskan yang bahwasannya:

“Ada bantuan yang saya terima, yaitu uang modal usaha dengan uang itu saya sekarang membeli motor kalau tidak dari uang itu saya tidak ada uang lain untuk membelinya, dan saya membuka usaha jual beli gas elipiji yang sekarang saya hanya dari usaha tersebut mendapatka uang sehari-hari dan juga bantuan rumah, bantuan tersebut dikasih berupa uang yang harus membangun rumah dan dikasih melalui KPA dan itu tidak melalui geuchik saya disuruh datang kekantor BRA.

Disana diminta nomor rekening, uang yang diberikan senilai 40 juta namun tidak langsung dikasih semua tetapi mereka memberika pertahap, karena mereka melihat apakah ada dibuat ataupun tidak, kalau dilihat ada, dan udah selesai setengah

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Hanafiah Pegawai BRA Pada Tanggal 20 Desember 2019

<sup>54</sup> Wawancara dengan Wahyul Hadi dkk Pada Tanggal 20 Desember 2019

mereka memberikan lagi, dan bantuan untuk anak yatim konflik pada tahun 2017 senilai 1.5 juta dan biaya siswa lainnya senilai 1.5 juta totalnya 3 juta uang.

Penelitian ini mewawancarai ke- 4 penerima bantuan. Pemberdayaan dalam pandangan mereka bahwa pemerintah telah memberikan beberapa bantuan pemberdayaan seperti bantuan rumah terbakar, uang kematian karena pada masa konflik penderitaan yang dialami oleh korban berturut-turut dari suaminya ditangkap, dipukuli, dibunuh, disiksa dengan berbagai macam cara terjadi pemukulan, penembakan dan pembakaran rumah seperti yang dialami oleh ibu Nurma.

Bantuan/program lain yang telah diberikan pemerintah terhadap korban yaitu modal usaha dari modal usaha tersebut masyarakat korban konflik bisa membuka usaha seperti membuka usaha gas elpiji untuk mendapatkan penghasilan sehari-hari. Dari bantuan tersebut masyarakat korban konflik juga mempergunakan dana untuk membeli kendaraan pribadi agar memudahkan mereka dalam beraktifitas. Bantuan rumah dibakar juga diberikan oleh pemerintah dalam bentuk uang senilai 40 juta pertahap agar masyarakat korban konflik tidak menggunakan uang tersebut untuk hal-hal yang tidak diperlukan, pemerintah turun kelapangan untuk memantau apakah uang yang diberikan kepada korban dipergunakan untuk membuat rumah atau tidak, karena jika korban tidak membuat rumah maka pemerintah berhenti memberikannya dana.<sup>55</sup>

Bantuan selanjutnya adalah bantuan anak yatim korban konflik pada tahun 2017 senilai 1.5 juta dan beasiswa lainnya senilai 1.5 juta total bantuan yang diterima oleh anak yatim tersebut adalah 3 juta. Anak yatim tersebut mempergunakan uang yang diberikan pemerintah untuk

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Nurma dkk Pada Tanggal 17-18 Desember 2019

membeli sebuah Handphone agar dapat belajar karena tidak memiliki laptop untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, anak tersebut sekarang sedang menempuh pendidikan di UIN Ar-raniry Banda Aceh.

Selanjutnya bantuan yang diterima oleh korban adalah bantuan mesin penggilingan kelapa gongseng, korban juga dibantu dalam bidang pekerjaan yaitu sebagai karyawan di kantor Kecamatan Panga dikarenakan pemerintah melihat bahwa korban memiliki 2 orang anak yang masih bayi dan tidak memiliki seorang suami. pada saat megang dan lebaran pemerintah memberikan daging dan uang kepada korban konflik, ada yang mendapatkan 50 ribu dan ada juga yang mendapatkan 500 ribu perbedaan yang pemerintah berlakukan karena perbedaan usia. Terakhir adalah dana bantuan kematian dengan jumlah uang senilai 6 juta dengan dua kali pemberian.

2. yang tidak menerima bantuan pemberdayaan salah pendapat dari informan Halimah beliau mengatakan bahwasannya:

“Selama ini saya tidak pernah mendapatkan bantuan karena mungkin menurut mereka saya tidak layak untuk menerimanya karena saya memiliki usaha sendiri yaitu menjual kelotongan. karena ada sebagian korban konflik yang memang bantuan rutin, semuanya mendapatkan, dan ada sebagian perhatian khusus tetapi itu bukan dari dana hibah, contoh bantuan dari BRA seperti rumah”.

Setelah peneliti mewawancarai ke-4 korban yang tidak menerima bantuan pemberdayaan mengatakan bahwa setelah perdamaian tahun 2005 mereka tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah karena pemerintah melihat mereka tidak layak untuk diberikan bantuan karena

memiliki penghasilan yang cukup dan ada sebagian yang memiliki usaha sendiri serti usaha kelontong dari usaha yang dijalankan oleh korban, mereka mendapatkan penghasilan dari hasil jualan tersebut.<sup>56</sup>

Masyarakat korban konflik lainnya tidak mengetahui mengapa sebagian korban mendapatkan bantuan dan sebagian korban lainnya tidak mendapat bantuan dari pemerintah karena apa yang dialami oleh korban seperti penyiksaan, pemukulan dan sebagainya semua sama bagi mereka. Menurut mereka mungkin pemerintah menganggap bahwa yang tidak mendapatkan bantuan karena mereka dalam kehidupan sehari-hari penghasilannya tercukupi, Mereka beranggapan seperti itu karena ada korban yang anaknya seorang wakil panglima GAM.<sup>57</sup>

Sebagian korban memiliki anak yang bisa dikatakan dalam kategori sukses seperti ibu Mariah ia memiliki seorang anak yang sukses anak pertama menjadi pegawai tetap di dinas social, anak yang kedua bekerja sebagai juru bicara PA karena kedua anaknya memiliki penghasilan maka pemerintah tidak memberikan bantuan terhadap beliau, karena dianggap mampu dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian masyarakat korban konflik juga berpendapat bahwa yang menerima bantuan dari pemerintah berdasarkan kedekatan emosional antara pemerintah dengan korban atau antara aparat gampong dengan korban, jika tidak memiliki kedekatan dengan kedua pihak tersebut maka korban susah untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Halimah dkk Pada Tanggal 17 Desember 2019

<sup>57</sup> Wawancara dengan Raimah Pada Tanggal 18 Desember 2019

<sup>58</sup> Wawancara dengan Mariah dkk Pada Tanggal 17- 19 Desember 2019

## **D. Dampak Pemberdayaan Pemerintah Terhadap Keluarga Korban Pasca Konflik**

Sebuah program yang dilakukan pasti akan mempunyai dampak bagi manusia. Sebuah perubahan menuju kearah kebaikan adalah tujuan dari adanya sebuah program yang menjadikan masyarakat korban konflik makmur sejahtera yaitu sebuah hasil yang diharapkan oleh pemerintah.

Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat miskin agar dapat memecahkan masalahnya secara mandiri, suatu proses untuk meraih atau mencapai tahapan dan kualitas kehidupan atau status sosial ekonomi yang lebih baik, membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas untuk mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. berbagai macam perubahan kearah yang lebih baik bagi keluarga korban konflik, perubahan tersebut menjadi pelajaran bagi masyarakat akan pentingnya sebuah usaha untuk keluar dari keterpurukan. Ada beberapa dampak pemberdayaan yaitu dampak sosial, ekonomi dan politik.<sup>59</sup>

### **a. Dampak Ekonomi Adanya Pemberdayaan**

Dampak ekonomi dengan adanya program/bantuan dari pemerintah adalah masyarakat korban konflik merasakan kesejahteraan atau merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Dengan adanya bantuan dari pemerintah korban mempergunakan dengan sesuai

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Wahyul Hadi Pegawai Dinas Sosial Pada Tanggal 20 Desember 2019

kebutuhannya yang dulu bekerja keras untuk mencari nafkah dengan adanya bantuan bisa sedikit mengurangi beban/pekerjaan ekonomi yang di alami oleh korban konflik contoh dengan adanya program usaha ekonomi produktif merupakan salah satu upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga korban konflik, memberikan fasilitas dan mendorong adanya keinginan, kemampuan untuk menjalankan usaha yang telah pemerintah berikan. Korban konflik juga bisa membuka usaha yang kemudian dari usaha tersebut mendapatkan penghasilan, usaha yang dijalankan oleh korban mampu mendukung warga memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>60</sup>

Kebutuhan dapat terpenuhi dengan adanya usaha ekonomi berupa pemenuhan kebutuhan keseharian baik digunakan untuk belanja, kegiatan sosial, dan kebutuhan kesehatan, selain berpengaruh terhadap pemenuhan keseharian, usaha juga memiliki manfaat dalam pemenuhan kebutuhan batin korban. Usaha memberikan kesenangan korban dikarekan dengan adanya usaha korban masih aktif dalam bekerja menjadi salah satu kesenangan bagi korban masyarakat tidak merasa bosan kerana tidak memiliki kegiatan.

Secara keseluruhan berwirausaha bagi korban konflik memiliki manfaat dalam pemenuhan kebutuhan warga, pemenuhan warga bukan sekedar pemenuhan keseharian saja melainkan masyarakat merasa puas dan senang ketika warga masih tetap aktif dalam bekerja untuk memperoleh pendapatan yang mendukung dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga merasa bangga, senang dan memiliki motivasi yang tinggi untuk tetap menjalankan usaha yang

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Ani dkk Pada Tanggal 19 Desember 2019

mampu menghasilkan pendapatan, memiliki pengaruh terhadap kemandirian hidupnya.<sup>61</sup>

Kedua seperti bantuan rumah korban konflik yang sudah tidak layak untuk ditempati dengan adanya bantuan rumah maka korban tidak terbebani/tidak lagi memikirkan dari mana mendapatkan uang untuk membuat rumah dan berbagai macam bantuan yang diberikan oleh pemerintah sangat membantu masyarakat korban konflik dalam bidang ekonomi seperti menyekolahkan anak-anak korban konflik dan yang lainnya tetapi masyarakat korban konflik tidak bergantung pada bantuan yang diberikan, yang diberikan oleh pemerintah hanya untuk membantu dan bisa dipergunakan seadanya, masyarakat harus bekerja untuk kebutuhan sehari-hari.

Program palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap korban rata-rata mengalami kemajuan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan ketersediaan pangan masyarakat, dan meningkatkan pendapatan, kesejahteraan korban dan menciptakan lapangan kerja mengurangi pengangguran didalam masyarakat.

#### **b. Dampak Sosial Adanya Pemberdayaan**

Dampak pemberdayaan pemerintah dalam hal positif: serangkaian nilai dan jaringan yang dapat menggerakkan masyarakat melakukan kegiatan bersama-sama untuk tujuan kesejahteraan, dengan demikian masyarakat yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dan tinggal dalam satu

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Nurma dkk Pada Tanggal 17 Desember 2019

wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, dapat memecahkan masalah social yang dialaminya serta merupakan wadah pengembangan usaha bersama.

Keluarga usaha binaan bersama yang dibentuk dari beberapa keluarga untuk melaksanakan kegiatan usaha ekonomi produktif(UEP) dalam rangka kemandirian usaha meningkatkan kesejahteraan sosial anggotanya dan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Dalam usaha pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah akan lebih sempurna jika dilakukan dengan cara berkelompok karena kalau dilakukan sendiri maka hasil tidak akan maksimal jika dikerjakan berkelompok akan terlihat hasilnya, baik dari segi pendapatan maupun dari aspek sosial.

Keberhasilan suatu usaha sangat bergantung dari masing-masing individu dalam mengelola usahanya maka dengan adanya usaha seperti usaha kelompok korban dapat disatukan, disamakan persepsi, tujuan dan manfaat dalam mengelola usaha tersebut. Serta meningkatkan rasa kebersamaan dan bekerjasama dalam mengelola usaha kelompok dengan demikian pengaruh sosial seperti kepercayaan antara masyarakat maka usaha tersebut dapat berjalan dengan baik.

Misalnya seperti adanya bantuan kelompok tambak, lahan exs-combatan pemerintah memberikan lahan kepada korban disatu wilayah yang kemudian dibagikan kepada korban, maka korban disaat melakukan kegiatan seperti menanam kelapa sawit dan sebagainya disaat yang bersamaan maka masyarakat bisa saling berinteraksi dan menukar pikiran, membangun hubungan yang baik atau silaturahmi dengan masyarakat, tokoh masyarakat, aparat

dan membangun komunikasi dengan instansi pemerintah sehingga meningkatkan pemahaman mereka.<sup>62</sup>

Dampak negatif adanya pemberdayaan pemerintah: Masyarakat merasa kecewa terhadap pemerintah yang bahwa bahwa pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat korban konflik yang dekat dengan aparat atau yang memiliki hubungan emosional dengan pemerintah daerah. Dampak sosial lainnya menimbulkan kecemburuan di antara masyarakat korban konflik karena sebagian masyarakat diberikan bantuan oleh pemerintah dan sebagian korban lainnya tidak mendapatkannya. Sedangkan apa yang dialami atau keadaan ekonomi dari mereka sama walaupun ada sedikit perbedaan.

Dalam penyaluran pemberdayaan bantuan apa saja yang diberikan pemerintah tidak selalu berhubungan dengan kedekatan emosional. Misalnya dalam pengalaman ibu Raimah yang memiliki anak sebagai wakil panglima GAM tetapi pada kenyataannya ia juga tidak pernah mendapatkan bantuan apapun walaupun memiliki hubungan kekeluargaan karena ia dianggap mampu dalam ekonomi.<sup>63</sup>

### **c. Dampak Politik Adanya Pemberdayaan**

Dampak politik dengan adanya program tidak ada unsur politik karena pemerintah tidak mencampur adukkan masalah politik dengan bantuan yang diberikan kepada korban konflik, pemerintah dalam hal pemberian bantuan melakukannya secara netral karena masyarakat membutuhkan bantuan yang di berikan. Maka ada sebagian warga yang mengatakan bahwa siapa yang memilih PA maka mereka

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Nurbayan dkk Pada Tanggal 18 Desember 2019

<sup>63</sup> Wawancara dengan Mariah dkk Pada Tanggal 17-18 Desember 2019

yang mendapat bantuan sebenarnya tidak pernah pemerintah melakukan seperti yang dianggap oleh masyarakat.

Pemerintah melakukan kegiatan pemberian bantuan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Maka apa yang dikatakan oleh sebagian korban bahwa pemerintah memberikan bantuan kepada korban yang memiliki kedekatan emosional maka salah pemerintah tidak membanding-bandingkan antara korban bagi pemerintah semua korban sama. Pemerintah hanya memilih korban yang dianggap layak/wajar untuk di berikan bantuan karena keadaan ekonomi yang tidak memadai.<sup>64</sup>

Ada sebagian masyarakat juga mengatakan bahwa pemerintah memberikan bantuan terhadap korban yang memilih PA namun pada saat pemilihan pemilu terlihat meskipun korban penerima bantuan ia tidak serta merta memilih PA, namun berbeda dengan korban yang tidak menerima bantuan meskipun mereka kecewa tetapi mereka tetap setia dengan PA. Pemerintah tidak menghubungkan masalah pemilu dengan bantuan yang diberikan kepada masyarakat korban konflik. Bagi pemerintah politik berjalan dengan sendirinya.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Hanafiah Pegawai BRA Pada Tanggal 20 Desember 2019

<sup>65</sup> Wawancara dengan Umi Kalsu dkk Pda Tanggal 18-19 Desember 2019

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Aceh merupakan salah satu provinsi yang mengalami konflik. Konflik di Aceh salah satunya adalah konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah tahun 1976-2005. Di masa konflik, Aceh sangat memprihatinkan kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap daerah Aceh hal ini membuat kondisi ekonomi di Aceh semakin terperuk. Aceh pasca konflik dan tsunami telah dihadapkan kepada kemiskinan yang tinggi sehingga perekonomian di Aceh sangat memburuk. Konflik berkepanjangan antara GAM dengan pemerintah Indonesia membawa pengaruh yang sangat merugikan dalam aspek ekonomi dan harta benda korban.

Setelah konflik pemerintah Aceh telah membuat beberapa program pemberdayaan terhadap korban konflik seperti program mendirikan rumah bagi korban yang rumahnya dibakar, program usaha ekonomi produktif (UEP) seperti palawija, mesin jahit, usaha kelotong dan peralatan kue, memberikan program berupa kendaraan pribadi seperti becak, program beasiswa anak yatim korban konflik, memberikan program lahan kepada exs-combatan dan korban konflik, diberikan mesin penggilingan kelapa gongseng, mesin penggiling padi, mesin perontok padi dan mesin penggiling kopi, Modal usaha perbengkelan, Program modal kelompok tambak, Program peternakan sapi dan kambing.

## **B. SARAN**

1. Diharapkan kepada pemerintah agar adil dalam membagikan bantuan secara merata walaupun hanya satu bantuan terhadap korban konflik, tidak memilih kalangan tertentu.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang potret keluarga korban konflik, program-program pemberdayaan yang telah diberikan oleh pemerintah bagi korban konflik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Chaidar-Al, *Gerakan Aceh Merdeka Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*, Banda Aceh: Madani Press, 1999.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademik Presindo, (Jakarta: 1993).
- Bogda dalam buku Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*.
- Djam'am Satori, dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Alfahbeta, 2011).
- Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, :PT Remaja Rosdakarya, 2007).
- Muri yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Kencana: Jakarta. 2014.
- Syamsuddin Nasruddin, *Integrasi Politik di Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Yunus Saifuddin dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Pasca Konflik Aceh*, Bandar Publishing, Banda Aceh: 2015.
- Riza Risyanti, *Pembedayaan Masyarakat*, Sumedang, Alqaprint Jatinangor, 2006.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung. 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung. 2016.
- Jawa Barat. 2017.
- Supadri dalam buku Muh.Fitrah dan Lutfiyah, *Metode Penelitian: Kualitatif, Tindakan dan Studi Kasus*, Cv Jejak.
- Susan Stainback dalam buku Sugiyono,, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*.
- Erni Febrina Harahap, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional Yang Tangguh dan Mandiri*, Vol 3, No 2, Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta, Padang: mei 2012.
- Gambaran Umum dan Kondisi Wilayah*, Dokumen RPIJM Kabupaten Aceh Jaya, 2014-2018.
- Rahmad, *Studi Gender dan Anak, Kelurga dan Pola Pengasuhan Anak*, Yinyang Vol. 5 No 1, STAIN Purwokerto: 2010.

Sri Widayanti, *Pemberdayaan Masyarakat*, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 1, No 1, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Padang, Januari-Juni 2012

Wahyuni Andri, Dalam Jurnal Konsep, Teori, dan Permasalahan.

Trijono Lambang, *Dalam Jurnal Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik di Indonesia: Kaitan Perdamaian, Pembangunan dan Demokrasi Dalam Pengembangan Pasca-5. 5.*

Mukmina, *Dalam Jurnal Dasar-dasar Ilmu Sosial*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas UNY: 2015.

Munawar Noor, *Pemberdayaan Masyarakat*, Vol I, No 2, Jurnal Fisip, Semarang: 2011.

Suadi Zainal, *Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi*, 2015.

Trijono Lambang, *Dalam Jurnal Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik di Indonesia: Kaitan Perdamaian, Pembangunan dan Demokrasi Dalam Pengembangan Pasca-Konflik*, Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2009.

Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga*, Fakultas Ekologi Indonesia-Institut Pertanian Bogor: 2013.

Kontras, Aceh, *Damai Dengan Keadilan? Mengungkapkan Kekerasan Masa Lalu*, Jakarta: Kontras, 2006. Mahatir Muhammad, *Pembangunan di Aceh Pasca Tsunami dan Konflik GAM-Pemerintah Indonesia: Dalam Aspek Ekonomi Politik*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.

Nasruddin, *Pengaruh Konflik GAM-RI Terhadap Kehidupan Beragama, Sosial dan Politik Rakyat Aceh*, UIN Sunan Kalijaga (1976-2005).



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syekh Abdurrauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY**  
Nomor: B-1055/Un.08/FUF/PP.00.9/05/2019

Tentang

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI SOSIOLOGI AGAMA**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP**  
**TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY**

- Menimbang:
- bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.
  - bahwa yang namanya tersebut dibawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
  - Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan: PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI SOSIOLOGI AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

**KESATU :** Mengangkat / Menunjuk saudara

a. Arfiansyah, S.Fil.I., M.A	Sebagai Pembimbing I
b. Fatimahsyam, SE., M. Si	Sebagai Pembimbing II

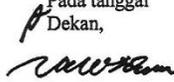
Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Putriana  
NIM : 150305062  
Prodi : Sosiologi Agama  
Judul : Potret Keluarga Korban Konflik dan Pemberdayaan Sosial di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya

**KEDUA :** Pembimbing tersebut pada diktum pertama diatas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 13 Mei 2019  
Dekan,

  
Fuadi

- Tembusan :
- Wakil Dekan I Fak. Ushuluddindan Filsafat
  - Ketua Prodi Sosiologi Agama Fak. Ushuluddindan Filsafat
  - Pembimbing I
  - Pembimbing II
  - Kasub. Bag. Akademik
  - Yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

Nomor : B-1969/Un.08/FUF.I/PP-00.9/08/2019

Lamp. : -

Hal : **Pengantar Penelitian**  
a.n. **Putriana**

Yth . Bapak/ Ibu

**BRA**.....  
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menyampaikan bahwa :

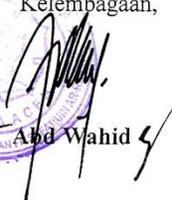
Nama : Putriana  
NIM : 150305062  
Prodi : Sosiologi Agama (SA)  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : Gampong Lingke- Kota Banda Aceh  
Tujuan Surat : Dinas Sosial, Kantor Partai Aceh (PA), Kantor Badan Raitegrasi Aceh (BRA) dan Kantor Camat Kecamatan Panga Aceh Jaya.  
Lama Penelitian : 3 (Tiga) Minggu

adalah benar mahasiswa/i Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan sedang melaksanakan penelitian/penulisan skripsi dengan Judul : **"Potret Keluarga Korban Konflik dan Pemberdayaan Sosial di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya"** yang bersangkutan membutuhkan data/literature yang terkait dengan penelitian tersebut. Dalam hal ini Kami memohon kepada Bapak/Ibu agar sudi kiranya dapat memberi bantuan bahan-bahan serta informasi data yang dibutuhkan.

Demikianlah surat ini kami sampaikan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

27 Agustus 2019

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,

  
  
Abu Wahid



Wawancara dengan bapak Hanafiah pegawai BRA



Wawancara dengan anggota PA



Wawancara dengan Wahyul Hadi pegawai Dinas Sosial



Wawancara dengan Camat Kecamatan Panga